



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 152 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan spirit, motivasi, pengembangan dari aspek teknis, kemampuan, pengetahuan, aturan hukum dan perilaku pengemudi angkutan umum serta menumbuhkan kesadaran terhadap harkat dan martabat para pengemudi yang sejajar atau setara dengan profesi lain maka dilaksanakan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pemilihan Abdi Yasa Teladan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Rekayasa Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

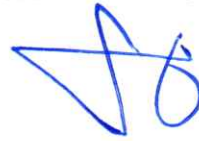
- KESATU : Membentuk Tim Pemilihan Abdi Yasa Teladan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Kabupaten;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan/penyuluhan, penilaian, kunjungan dan upacara pada Tingkat Kabupaten;
 - c. mempersiapkan, menyediakan dan melaksanakan hal-hal yang mendukung kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Abdi Yasa Teladan;
 - d. melakukan analisa, evaluasi, dan pemantauan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan hasil-hasil Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan pembinaan terhadap Abdi Yasa Teladan terpilih untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna keteladanannya;
 - f. mengajukan calon Abdi Yasa Teladan dari daerah Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi; dan

g. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan melaporkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *29 Maret 2023*.

↓ BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim yang bersangkutan


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 152 /2023
 TANGGAL 29 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN PADA
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kapolres Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kasat Lantas Polres Tabalong	Anggota	
12.	Unsur dari Jasa Raharja Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Seksi Terminal pada Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	

18.	Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kasubag TU UPT Balai PKB	Anggota	
21.	Kasubag TU UPT Bandar Udara Warukin Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
22.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyedia UPT Balai PKB Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
23.	Staf Polres Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
24.	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	

/ BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 